

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur kelurahan pelabuhan dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selamet Rahmadi^{1*}, Parmadi², Dwi Hastuti³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi, Jambi

Diterima: 29-03-2025	Direvisi: 12-04-2025	Disetujui: 28-04-2025	Dipublikasi: 30-04-2025
----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------

Abstract

The service activities aim to improve the quality of understanding and capability of human resources in Port Dagang Subdistrict, Tungkal Ulu Subdistrict, West Tanjung Jabung Regency related to basic government knowledge, management skills and technical capabilities in carrying out government duties and responsibilities in development in order to provide the best public services for the community. The service method uses community-based, persuasive, educative, participatory and normative development methods. This method is carried out to create quality human resources in the sub-district in administering government, both in the fields of law enforcement, openness, justice, efficiency and effectiveness as well as being sensitive to problems that arise. The results of this community service indicate an improvement in the understanding and knowledge of sub-district officials, as well as a strengthening their capacity to handle various community issues and carry out tasks in order to enhance the quality of public services optimally.

Keywords: Village Apparatus, Quality, Human Resources

Abstrak

Kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan kemampuan SDM aparatur kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pengetahuan dasar dalam pemerintahan, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan dalam pembangunan agar dapat memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Metode pengabdian menggunakan metode pengembangan basis komunitas, persuasif, edukatif, partisipatif dan normatif. Metode ini dilakukan untuk menciptakan SDM di kelurahan dengan kualitas yang baik dalam melaksanakan pemerintahan, baik dalam hal penegakan hukum, keterbukaan, keadilan, efisien, dan efektif serta peka terhadap permasalahan yang muncul. Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur kelurahan, serta memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan pelaksanaan tugas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal.

Kata kunci: Aparatur Kelurahan, Kualitas, SDM.

Pendahuluan

Pemberian kekuasaan yang luas sebagai implementasi otonomi daerah berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan berbagai program pembangunan di semua tingkatan pemerintahan, terutama di tingkat desa/kelurahan yang dapat menjadi sangat krusial. Sebagai tulang punggung dan prioritas utama, pembangunan di wilayah pedesaan/kelurahan diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional.

* Penulis korespondensi
Email: selamet_rahmadi@unja.ac.id

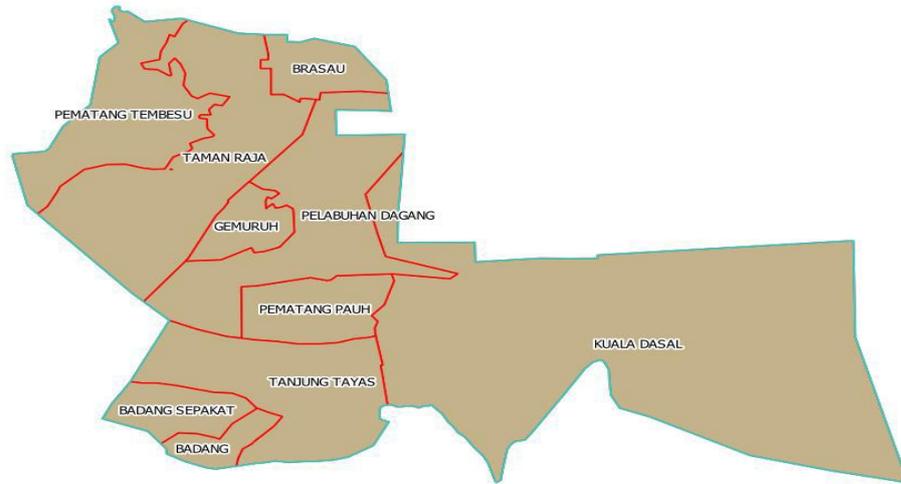
Keberhasilan dari pembangunan tersebut tidak lepas dari dukungan pelaksana/aparat pemerintah itu sendiri dan masyarakat. Aparat pemerintahan harus memiliki kemampuan atau pengetahuan yang optimal dan menjadi pelayan masyarakat. Kondisi ini mengharuskan pemerintah desa/kelurahan yaitu lurah dan perangkatnya berperan sebagai motivator, pembina, penjaga ketentraman, dan keamanan. Sebagai penyelenggara pemerintahan, maka kelurahan harus berupaya secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan kinerja organisasinya guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk itu setiap aparat kelurahan perlu memahami apa perannya, bagaimana mewujudkan dan bagaimana seharusnya memberikan layanan dengan baik. Sementara, masyarakat diwajibkan ikut berkontribusi dalam pembangunan dengan saling mendukung dan melengkapi program yang dilaksanakan.

Banyak faktor yang menjadi penentu keberhasilan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan ini. Menurut Sutrisno (2014) kualitas sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang terbatas adalah hal yang paling krusial. Namun, sebagian besar aparat desa/kelurahan memiliki kualitas yang cukup memprihatinkan dilihat dari rendahnya pemahaman dan kesadaran aparat terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk mengadakan dan mengikuti pelatihan. Fenomena tersebut menyebabkan banyak keluhan di masyarakat atas pelayanan yang diberikan, seperti sistem pelayanan yang memerlukan waktu lama, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan berdasarkan kedekatan, pemberian tips, dan sebagainya.

Rodiyah (2021) menjelaskan bahwa mengurangi hambatan tersebut memerlukan aparatur pemerintahan yang tangkas dan terampil serta memiliki pengalaman dalam menjalankan fungsi administrasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas SDM dalam pemerintahan desa/kelurahan salah satunya lewat peningkatan penguasaan teknologi IT ataupun ketersediaan sarana dan prasarana secara merata. Penggunaan teknologi wajib dilakukan dalam rangka pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Kadarisman, 2013). Lebih lanjut Siswanto (2019) menjelaskan pengembangan SDM perangkat desa/kelurahan harus terintegrasi dan dilakukan secara berkelanjutan. Upaya lain yang dapat dilakukan menurut Notoatmodjo (2015) adalah meningkatkan kapasitas aparatur negara melalui pengadaan pegawai, pengembangan karier, diklat atau pendidikan dan pelatihan, sistem penggajian, serta penerapan pengelolaan administrasi yang tepat sehingga dapat menjalankan tugas dalam jabatan secara optimal. Mendukung pernyataan tersebut, Rodiyah dkk (2021), menguraikan pengembangan kapasitas SDM aparatur dilakukan dengan melakukan pelatihan, pengupahan, kondisi lingkungan kerja yang kondusif, dan rekrutmen. Terwujudnya keadaan ini akan bermanfaat dalam mengembangkan karir, keterampilan, dan ketangguhan dalam melaksanakan pekerjaan (Labola, 2019). Peningkatan SDM aparatur tersebut diharapkan menjadikan mereka dapat bekerja secara profesional sehingga mencapai pelayanan yang optimal kepada masyarakat, bahkan mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan daerah otonom (Fajarwati, 2019).

Melihat peran penting SDM dalam pembangunan mengharuskan aparatur pemerintahan desa/kelurahan yang ada di setiap daerah, khususnya Kelurahan Pengabuan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu terus ditingkatkan, terutama pemahaman terkait pemerintahan, seperti peraturan perundang-undangan, administrasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang optimal. Pada tahun 2023, Kelurahan Pelabuhan Dagang memiliki 12 RT dengan luas wilayah administratif 36,87 Km² atau 10,67 % dari luas wilayah Kecamatan Tungkal Ulu seluas 345,69 Km². Kelurahan ini berbatasan dengan Desa Gemuruh di sebelah utara, Desa

Pematang Pauh di sebelah selatan, Desa Kuala Dasal di sebelah timur dan Desa Gemuruh di sebelah barat serta memiliki jarak dengan Ibu Kota Kabupaten sejauh 99 Km (Kecamatan Tungkal Ulu Dalam Angka, 2023).



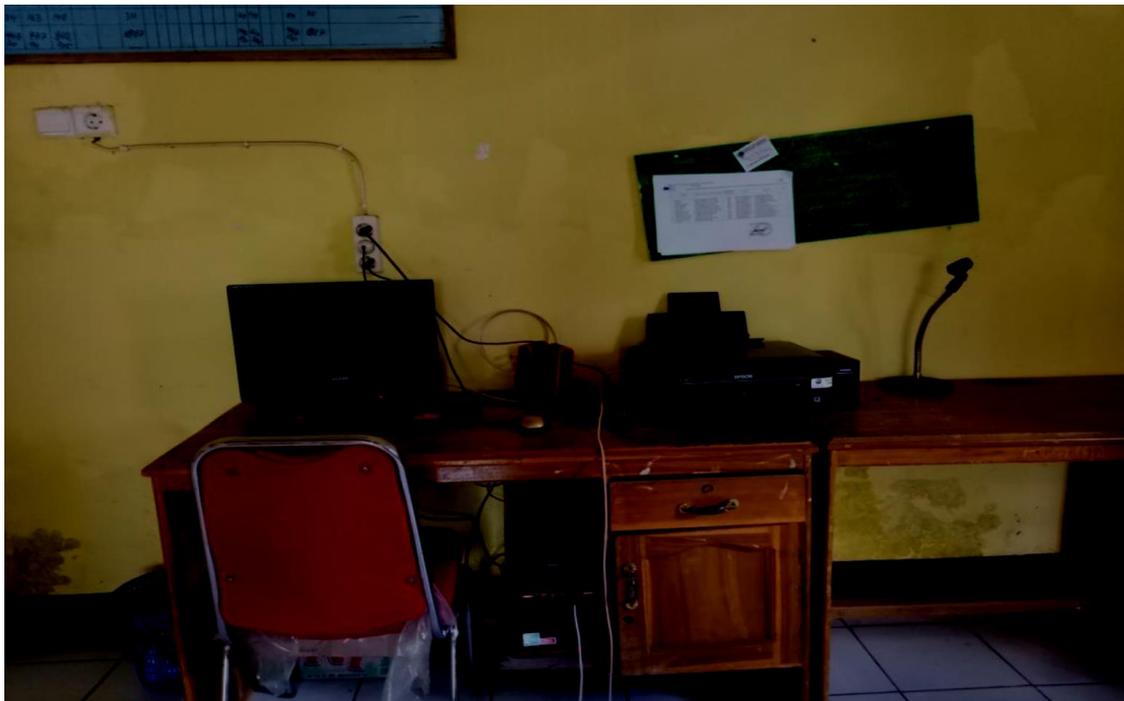
Gambar 1. Peta Wilayah Kelurahan Pelabuhan Dagang

Jumlah penduduk di tahun 2023 adalah 2.477 jiwa atau terdiri dari 662 KK. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 % dibandingkan jumlah pada tahun 2022 yaitu 2.424 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk membuat tugas dan tanggung jawab lurah beserta aparaturnya semakin berat dan kompleks dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang.



Gambar 2. Kantor Lurah Pelabuhan Dagang

Pelayanan yang diberikan sebaiknya dilaksanakan secara optimal dan lebih baik dari tahun ke tahun. Upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat sering menemui hambatan, hal ini disebabkan jumlah pegawai kelurahan yang sangat terbatas. Berdasarkan data di tahun 2023, total pegawai berjumlah 13 orang, yang mana 6 orang memiliki pendidikan SMA, 6 orang berpendidikan S1 dan 1 orang berpendidikan diploma. Kelurahan Pelabuhan Dagang memiliki struktur organisasi yang dipimpin Plh. Zulkairnain dengan membawahi sekretaris lurah, kasi pendapatan, kasi pembangunan, dan 9 orang staff kantor lurah.



Gambar 3. Fasilitas Ruang Kerja Kantor Lurah Pelabuhan Dagang

Keterbatasan jumlah petugas dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang tugas menyebabkan ketimpangan kompetensi, yang pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi aktivitas dan pelayanan di kelurahan. Kendala lainnya yaitu kurangnya kemampuan manajerial yang dimiliki atasan, terutama dalam pengorganisasian dan pemberdayaan SDM, serta keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi inilah yang dijumpai pada aparat Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hambatan-hambatan tersebut memberi dampak pada terganggunya proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terutama dalam hal pemberian pelayanan pada masyarakat.

Metode Pengabdian

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan SDM aparat Kelurahan Pelabuhan Dagang. Tujuan ini dicapai melalui serangkaian langkah meliputi:



Gambar 4. Skema Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat

Tahapan kegiatan meliputi delapan langkah, yaitu survey dan penetapan lokasi sasaran, negosiasi dan sosialisasi program kegiatan pada mitra, penandatanganan kerja sama dengan mitra, penetapan mahasiswa yang terlibat, pengurusan surat perizinan/tugas, menyiapkan kebutuhan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh seluruh perangkat kelurahan dan semua ketua RT Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 25-26 Mei 2024 pada hari jumat dan sabtu.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa ceramah, diskusi, dan demonstrasi dengan menggunakan pendekatan pengembangan berbasis komunitas, persuasif, edukatif, partisipatif, dan normatif. Setiap pendekatan yang digunakan bertujuan:

1. Pendekatan berbasis pengembangan komunitas bertujuan untuk memberikan pengalaman, membangun kemandirian dalam menghadapi berbagai persoalan, serta meningkatkan motivasi kerja kolektif dalam pelaksanaan tugas dan pembangunan berkelanjutan.

2. Pendekatan persuasif digunakan untuk memperkuat, membentuk atau mengubah perilaku aparat kelurahan guna mencapai tujuan dengan mengoptimalkan potensi yang tersedia.
3. Pendekatan edukatif memfokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melalui pendidikan.
4. Pendekatan partisipatif bertujuan meningkatkan peran aktif seluruh aparatur kelurahan dalam mengikuti Bimtek (bimbingan teknis) atau Diklat (pendidikan dan pelatihan) guna memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.
5. Pendekatan normatif ditujukan untuk memberdayakan mitra berlandaskan norma, nilai, hukum, dan peraturan yang berlaku, dengan tetap menghargai keberagaman dalam pelaksanaan kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, aparatur dituntut menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara profesional. Sementara, sebagai abdi masyarakat, pelayanan dimaknai sebagai upaya untuk senantiasa melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar segala urusan yang menyangkut kebutuhan anggotanya dalam pelaksanaan tugas. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, aparatur pemerintahan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Sejalan dengan itu, pemerintah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengingat bahwa manusia memegang peranan sangat penting dalam menentukan baik buruknya pelayanan yang diberikan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum mencapai hasil yang efektif dan maksimal, khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Kondisi ini juga ditemui di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana efektivitas pelayanan masih belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil diskusi di lapangan, tim mencoba memberikan beberapa solusi sekaligus rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur kelurahan sebagai bagian dari upaya penguatan pelayanan publik. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat tiga fungsi utama, yaitu *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *Development Function* (fungsi pembangunan) dan *Protection Function* (fungsi perlindungan) dengan:

1. Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai isi peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku kepada lurah dan aparatur kelurahan terkait tugas dan fungsi secara benar dalam menjalankan tanggung jawabnya.
2. Mendorong lurah memberikan kesempatan pada perangkat kelurahan untuk meningkatkan pengetahuan dengan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan SDM kelurahan.
3. Memberikan akses informasi kepada aparatur kelurahan terkait program pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun non formal, yang relevan untuk mendukung peningkatan keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

4. Memberikan panduan dasar untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan SDM kelurahan kepada lurah secara efektif, efisien, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Mendorong lurah beserta aparaturnya untuk bersikap profesional, responsif, dan transparan setiap pelaksanaan tugas kepada masyarakat.
6. Mendorong lurah dan instansi terkait untuk memberikan apresiasi atau penghargaan kepada aparatur kelurahan yang menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik.
7. Merekomendasikan lurah dan aparatur kelurahan untuk senantiasa meningkatkan komunikasi internal terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
8. Lurah diwajibkan mampu mendelegasikan tugas kepada aparaturnya sebagai bentuk pemberian kepercayaan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.
9. Lurah perlu terus mengupayakan peningkatan fasilitas atau infrastruktur kantor yang dibutuhkan aparatur kelurahan dalam melaksanakan tugas secara optimal.
10. Meningkatkan kemampuan aparatur kelurahan dalam penguasaan penggunaan IT serta mendorong partisipasi aktif dalam bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan (Diklat) yang mencakup pengadministrasian, pengelolaan aset, perencanaan dan pengelolaan anggaran dari pemerintah daerah/pusat maupun instansi di luar pemerintah secara merata bagi seluruh bagi setiap aparatur kelurahan.
11. Lurah harus mampu memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, serta pengembangan SDM yang bersifat jangka panjang.
12. Mendorong lurah melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja aparatur secara berkala melalui penerapan mekanisme yang efektif untuk mengukur dan memonitor capaian, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan perbaikan yang diperlukan.

Perlu adanya upaya untuk mendorong lurah dan aparatur kelurahan agar meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan di tingkat daerah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Aparatur kelurahan yang berkualitas memegang peran penting bagi tercapainya tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang optimal serta berkontribusi nyata bagi pembangunan di tingkat daerah. Kondisi ideal ini masih belum sepenuhnya terwujud di lokasi pengabdian, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur kelurahan sehari-hari. Penyebab utama yang dijumpai adalah kurangnya pengetahuan aparatur kelurahan terkait dengan penguasaan isi undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan, serta lemahnya penguasaan kompetensi teknis, manajerial, interpersonal, dan profesional.

Saran

Upaya yang perlu dilakukan di masa mendatang untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur kelurahan adalah dengan melakukan evaluasi dan pemantauan atas kinerja secara berkala dan berkelanjutan, yang melibatkan setiap aparatur kelurahan, baik lurah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Daftar Pustaka

- Fajarwati, N. (2019). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka mewujudkan *good governance*. *Jurnal Wacana Kinerja*, 22 (2).
- Kadarisman. (2013). *Manajemen pengembangan pengembangan sumber daya manusia*. Raja Grafindo Persada.
- Labola, Y.A. (2019). Konsep pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, bakat dan ketahanan dalam organisasi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 7(1).
- Notoatmodjo, S. (2015). *Pengembangan sumber daya manusia*. PT Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., Usrotin, I. C. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1).
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia*. PT Refika Aditama.
- Siswanto, J. (2019). *Administrasi Pemerintahan Desa*. CV Rajawali.
- SIM LPPM Universitas Jambi. (n.d.). *Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://simlppm.unja.ac.id>
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.



© 2025 oleh penulis. Pemegang Lisensi JPM, Indonesia. Artikel ini merupakan artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY-SA)